

ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI *BACK OFFICE SELINDO* DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAJO

¹⁾Suharni*, ²⁾Darmawan, ³⁾ Jamal Qadar

^{1), 2), 3)} Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Puangrimaggalatung

¹⁾ bpsarni2007@gmail.com, ²⁾ darmawansanusi5@gmail.com

³⁾ jamalqadar8@gmail.com

*bpsarni2007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) dalam administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi keuangan melalui penerapan sistem berbasis elektronik. Aplikasi BOS merupakan salah satu inovasi digital yang digunakan di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk mendukung pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo dengan melibatkan lima informan utama yang terdiri atas Kepala BPS, Kasubag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Operator aplikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Aplikasi BOS dalam administrasi keuangan di BPS Kabupaten Wajo telah membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi. Fitur-fitur dalam modul kepegawaian, modul anggaran, modul keuangan, serta monitoring dan rekap dinilai mempermudah proses administrasi keuangan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Namun, implementasi aplikasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, kendala teknis sistem, adaptasi pengguna, dan keterbatasan pemahaman teknologi pada sebagian pegawai. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi dukungan pimpinan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi BOS berperan penting dalam mendukung efektivitas administrasi keuangan

di BPS Kabupaten Wajo, meskipun masih diperlukan peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan sistem yang lebih adaptif untuk mendukung optimalisasi implementasi aplikasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Back Office Selindo, administrasi keuangan, digitalisasi, administrasi publik, Badan Pusat Statistik

Abstract

This study aims to analyze the use of the Back Office Selindo (BOS) Application in financial administration at the Central Bureau of Statistics (BPS) of Wajo Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research is motivated by digital transformation in public governance, which demands increased efficiency, transparency, and accountability in financial administration through the implementation of electronic-based systems. The Back Office Selindo Application is one of the digital innovations used within the Central Bureau of Statistics to support integrated financial management.

research This study employed a descriptive qualitative research method. The was conducted at the Central Bureau of Statistics of Wajo Regency involving five key informants consisting of the Head of BPS, Head of General Affairs Subdivision, Commitment Making Officer, Expenditure Treasurer, and Application Operator. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the use of the Back Office Selindo Application in financial administration at BPS Wajo Regency has helped improve work efficiency, accelerate financial management and reporting processes, and support transparency and accountability in administration. The features contained in the personnel module, budgeting module, financial module, as well as monitoring and recap modules are considered capable of facilitating financial administration processes in a more systematic and integrated manner. However, the implementation of the application still faces several obstacles, such as limited internet connectivity, technical system issues, user adaptation challenges, and limited technological understanding among some employees. Supporting factors for implementation include leadership support, the availability of facilities and infrastructure, and the competence of human resources.

Based on the findings, it can be concluded that the Back Office Selindo Application plays an important role in supporting the effectiveness of financial administration at BPS Wajo Regency. Nevertheless, improvements in training, strengthening of technological

infrastructure, and the development of a more adaptive system are still needed to optimize the implementation of the application in the future.

Keywords: *Back Office Selindo, financial administration, digitalization, public administration, Central Bureau of Statistics.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital kini menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan di berbagai belahan dunia. Arus globalisasi teknologi informasi telah mendorong pemerintah di seluruh negara untuk melakukan reformasi birokrasi menuju model administrasi publik berbasis data dan sistem digital yang terintegrasi, yang berorientasi pada peningkatan efisiensi layanan dan kualitas kebijakan publik (Latip *et al.* 2025).

Digitalisasi layanan publik terbukti mampu menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperluas akses layanan bagi masyarakat (Renanda and Rosidin 2025). Transformasi digital juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan menyediakan sistem layanan yang mudah diakses dan diaudit secara (Saputra *et al.* 2024). Dengan kata lain, digitalisasi tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah berkembang menjadi kebutuhan sistemik untuk membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap perubahan global.

Kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik mulai memperlihatkan hasil konkret di berbagai daerah di Indonesia menjadi contoh yang dikenal sebagai pelopor implementasi *e-government* di tingkat daerah. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat.

Melalui sistem digital seperti *Sadayana* dan *E-Penting*, pemerintah daerah berhasil memangkas waktu pelayanan dan mengurangi beban administratif secara signifikan. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya faktor literasi digital dan kesiapan infrastruktur sebagai elemen penentu efektivitas digitalisasi. Artinya, tanpa kapasitas sumber daya manusia yang memadai dan dukungan teknologi yang stabil, tujuan besar digitalisasi tidak dapat tercapai secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga tentang kesiapan sosial dan kultural aparatur dalam mengelola perubahan.

Meski demikian, keberhasilan implementasi aplikasi *Back Office Selindo* tidak serta-merta merata di seluruh satuan kerja Badan Pusat Statistik. Di beberapa daerah, termasuk di Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, penerapan sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jaringan internet, ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi intensif dari pusat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sidik *et al.* (2025) yang menyebutkan bahwa banyak instansi pemerintah daerah masih belum memiliki kesiapan yang memadai dalam aspek manajemen keamanan informasi dan perlindungan aset digital. Akibatnya, meskipun sistem digital telah diterapkan, efektivitasnya dalam mendukung efisiensi keuangan dan transparansi administrasi

masih belum optimal. Hal ini menegaskan bahwa implementasi sistem informasi publik tidak cukup hanya dengan penyediaan perangkat lunak, melainkan harus diikuti strategi pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (R, Jalil, and Mandaraira 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik administrasi publik mengalami pergeseran dari sistem manual menuju sistem digital yang dikenal dengan konsep e-government. Transformasi administrasi publik memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan publik. Sejalan dengan penerapan teknologi baru, pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis informasi dan pendekatan layanan menjadi lebih responsif sehingga menghasilkan dampak positif. Transformasi tersebut juga menyebabkan perubahan pola pikir dan praktik birokrasi yang mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Noorrahman, Rizal, and Sairin 2022; Utami 2023).

Tujuan umum dari administrasi publik adalah mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara proses perumusan kebijakan dan implementasinya agar pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal berdasarkan prinsip *good governance*.

Prinsip-prinsip administrasi publik kontemporer dibangun di atas empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan. Prinsip transparansi menekankan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sedangkan akuntabilitas menuntut setiap aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja secara etis dan profesional.

Menurut Nurman, Zainal, and Ardiansyah (2024), keempat prinsip ini merupakan pondasi utama reformasi birokrasi di era digital karena menciptakan lingkungan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi kinerja. Pada konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan konseptual yang sangat relevan untuk menganalisis efektivitas sistem digital dalam administrasi pemerintahan, seperti penerapan Aplikasi *Back Office Selindo* (BOS) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.

Aplikasi *Back Office Selindo* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional internal organisasi. Modul Kepegawaian dalam Aplikasi *Back Office Selindo* berfungsi sebagai fondasi administratif dalam pengelolaan keuangan karena memuat data pegawai, data mitra, serta presensi yang terintegrasi dengan sistem SIMPEG. Modul Anggaran dalam *Back Office Selindo* mencakup Entri Pembiayaan (POK), revisi POK, revisi DIPA, *self-blocking*, monitoring revisi, dan rebooking. Modul ini menjadi instrumen utama dalam pengendalian perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fitur alokasi unit kerja, jenis pengeluaran, tipe form, pembebanan, dan PPK menunjukkan adanya mekanisme kontrol administratif yang sistematis. Modul Keuangan mencakup realisasi permintaan, rekap bendahara, pajak, monitoring, hingga integrasi dengan sistem SAKTI. Modul ini merupakan inti siklus pelaksanaan anggaran karena mencatat realisasi belanja, verifikasi, hingga pencetakan dokumen SPP/SPM. Integrasi dengan SAKTI menunjukkan keselarasan dengan sistem perbendaharaan nasional. Pada teori *Public Financial Accountability*, sistem keuangan digital harus

menjamin akurasi, *audit trail*, dan keterlacakan transaksi (Lakat 2025). Modul ini juga mencerminkan variabel “disposisi pelaksana” dalam teori Edward III, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan bendahara dan operator dalam menginput data secara tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, khususnya di lingkungan BPS Kabupaten Wajo yang sedang berada pada tahap adaptasi terhadap sistem administrasi digital. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana Aplikasi *Back Office Selindo* berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja administrasi keuangan, serta bagaimana faktor manusia, teknologi, dan kebijakan berinteraksi dalam konteks penerapan sistem tersebut.

Berdasarkan sisi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian efektivitas sistem informasi publik di Indonesia. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat kapasitas aparatur dan merancang strategi implementasi sistem keuangan digital yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini diarahkan pada dua variabel utama, yaitu penggunaan aplikasi *Back Office Selindo* dalam proses administrasi keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPS Kabupaten Wajo, dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasinya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu Kepala BPS Kab. Wajo, Kasubag Umum (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Operator. Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penggunaan *Back Office Selindo* Dalam Administrasi Keuangan

a. Modul Kepegawaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul kepegawaian merupakan salah satu fitur yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi keuangan di BPS Kabupaten Wajo. Modul ini digunakan untuk mengelola data pegawai, presensi, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan hak-hak pegawai. Data yang tersedia dalam modul kepegawaian telah terintegrasi dengan sistem lain sehingga memudahkan proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Wajo, menjelaskan bahwa keberadaan modul kepegawaian memberikan kemudahan dalam memantau data pegawai dan kehadiran pegawai secara lebih sistematis.. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa data presensi yang tersedia pada sistem membantu proses pembayaran uang makan,

lembur, dan hak-hak pegawai lainnya sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat.

Informan lainnya mengemukakan bahwa penggunaan modul kepegawaian mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Seluruh data tersimpan dalam satu sistem sehingga lebih mudah ditelusuri apabila diperlukan untuk keperluan verifikasi maupun pelaporan. Dengan demikian, modul kepegawaian tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan data pegawai, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung ketepatan administrasi keuangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan modul kepegawaian telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan administrasi keuangan. Integrasi data yang tersedia membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat proses pelayanan internal yang berkaitan dengan pegawai, disamping itu temuan tersebut menunjukkan bahwa BOS telah memenuhi unsur efektivitas sistem informasi sebagaimana dikemukakan oleh DeLone dan McLean, yaitu mampu meningkatkan kualitas layanan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi kerja pengguna. Penggunaan sistem yang terintegrasi telah mengurangi proses manual, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan ketepatan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

b. Modul Anggaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa modul anggaran digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pengalokasian, revisi, dan pengendalian anggaran. Para informan menyatakan bahwa keberadaan modul ini membantu pengelola keuangan dalam memantau kondisi anggaran secara lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala BPS menjelaskan bahwa modul anggaran memberikan kemudahan dalam melihat perkembangan realisasi anggaran serta memantau tingkat penyerapan anggaran setiap kegiatan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program kerja. Selain itu, PPSPM (AS) dan PPK (RF) juga menjelaskan bahwa sistem membantu proses revisi anggaran karena seluruh informasi terkait pagu dan realisasi dapat dilihat secara langsung melalui aplikasi.

Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan modul anggaran meningkatkan keteraturan administrasi dan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Informan menilai bahwa proses pengawasan menjadi lebih mudah karena data yang dibutuhkan tersedia secara terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini juga berdampak pada peningkatan transparansi penggunaan anggaran karena setiap perubahan dan realisasi dapat ditelusuri dengan lebih jelas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul anggaran berperan penting dalam mendukung pengendalian anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BPS Kabupaten Wajo.

c. Modul Keuangan

Modul keuangan merupakan salah satu fitur yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa modul ini memberikan banyak kemudahan dalam

proses realisasi anggaran, pembayaran kegiatan, serta penyusunan laporan keuangan.

Hasil wawancara bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa aplikasi membantu proses pembayaran honorarium, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya karena data yang dibutuhkan telah tersedia dalam sistem. Selain itu, sistem juga membantu mengurangi kesalahan input karena sebagian besar data telah tersimpan dan dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Sementara Operator BOS (AZ) menambahkan bahwa penggunaan sistem membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan metode manual yang pernah digunakan sebelumnya, AZ juga menambahkan bahwa *Back Office Selindo* telah terhubung dengan aplikasi SAKTI, sehingga proses sinkronisasi data realisasi dapat dilakukan secara real-time. RF juga menyatakan bahwa BOS membantu memantau kesesuaian realisasi antara satker dan SAKTI.

Informan lainnya juga menyampaikan bahwa modul keuangan membantu proses verifikasi dan pengawasan dokumen keuangan. Data transaksi dapat ditelusuri kembali dengan mudah sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketersediaan informasi secara cepat juga membantu pimpinan dalam memantau perkembangan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa temuan tersebut dapat dipahami bahwa modul keuangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi keuangan. Penggunaan sistem terintegrasi mampu mempercepat proses kerja sekaligus meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

d. Monitoring rangkap.

Monitoring dan rekap merupakan fitur yang digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan dan realisasi anggaran secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menilai bahwa fitur ini sangat membantu dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Hasil wawancara Kepala BPS menjelaskan bahwa laporan monitoring dan rekap memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan serta tingkat penyerapan anggaran pada setiap periode tertentu. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Informan RF menambahkan bahwa pimpinan dapat mengawasi selisih realisasi antara BOS dan SAKTI secara langsung. Informan Bendara FJ juga menyatakan bahwa fitur monitoring memudahkan identifikasi sisa anggaran, realisasi, dan kegiatan yang belum terlaksana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fitur monitoring dan rekap memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola administrasi keuangan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pengelola keuangan, tetapi juga bagi pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan.

2. Analisis factor pendukung dan penghambat *Back Office Selindo* di BPS Kabupaten Wajo.

a. Faktor pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi aplikasi *Back Office Selindo* di BPS Kabupaten Wajo. Faktor pertama adalah dukungan pimpinan yang secara konsisten mendorong penggunaan aplikasi yang diwujudkan melalui pengawasan, arahan, dan evaluasi terhadap penggunaan sistem.

Faktor kedua adalah kompetensi sumber daya manusia. Sebagian besar pengguna telah memahami cara penggunaan aplikasi sehingga mampu memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia. Pengalaman dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan sistem turut mendukung dalam kelancaran implementasi aplikasi.

Ketersediaan fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet, akses sistem juga menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan administrasi keuangan berbasis digital. Informan menilai bahwa fasilitas yang tersedia saat ini cukup membantu dalam mendukung penggunaan aplikasi.

Faktor pendukung lainnya adalah integrasi data antar modul yang memungkinkan informasi dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Integrasi tersebut membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi duplikasi pekerjaan..

b. Faktor penghambat

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi aplikasi *Back Office Selindo* masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan yang paling sering disampaikan oleh informan adalah gangguan jaringan internet, penggunaan VPN (*Virtual Private Network*) dan ketidakstabilan server. Kondisi tersebut menyebabkan proses akses aplikasi menjadi lambat bahkan terkadang tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Selain itu, beberapa informan juga mengemukakan bahwa sinkronisasi data dengan sistem lain terkadang mengalami keterlambatan. Kondisi ini menyebabkan informasi yang ditampilkan pada aplikasi belum sepenuhnya sesuai dengan data yang terdapat pada sistem lainnya sehingga memerlukan pengecekan tambahan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek teknis aplikasi, seperti kebutuhan penyempurnaan fitur tertentu agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa pengguna baru masih memerlukan pendampingan agar dapat memahami seluruh fungsi dan fitur yang tersedia pada aplikasi. Informan lainnya juga menyampaikan bahwa

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi aplikasi *Back Office Selindo* di BPS Kabupaten Wajo lebih banyak berasal dari faktor teknis dibandingkan dengan faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi serta pengembangan sistem secara berkelanjutan agar pemanfaatan aplikasi dapat berjalan lebih optimal..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penggunaan Aplikasi *Back Office Selindo* Dalam Administrasi Keuangan Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Aplikasi *Back Office Selindo* Dalam Administrasi Keuangan

Penggunaan aplikasi *Back Office Selindo* dalam administrasi keuangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini terlihat dari pemanfaatan modul kepegawaian yang mendukung akurasi dan integrasi data sumber daya manusia, modul anggaran yang membantu pengendalian serta monitoring realisasi anggaran, modul keuangan yang mempercepat proses realisasi dan pelaporan keuangan, serta fitur monitoring dan rekap yang mendukung pengawasan internal dan transparansi organisasi. Keberadaan sistem yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah akses informasi, dan membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Keberhasilan implementasi aplikasi BOS didukung oleh dukungan pimpinan, tersedianya sarana dan prasarana, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai..

2. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi *Back Office Selindo* dalam administrasi keuangan

Penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang masih dihadapi, yaitu kendala teknis berupa gangguan jaringan dan sinkronisasi sistem, adaptasi pengguna terhadap perubahan digital, serta keterbatasan beberapa fitur aplikasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional pengguna.

Meskipun terdapat hambatan tersebut, secara keseluruhan aplikasi BOS telah memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kendala yang muncul dan mampu mendukung terwujudnya administrasi keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di BPS Kabupaten Wajo.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan rasa syukur atas kehadiran-Nya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada semua informan lingkup BPS Kabupaten Wajo dalam penelitian ini atas kesediaan mereka untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga menghargai dukungan dan bimbingan dari pembimbing dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

Amelia, Arrie Budhiartie, and Eko Nuriyatman. 2025. "Analisis Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik Dalam E- Government Terhadap Hak Masyarakat Di Tengah Ketimpangan Akses Internet." 8765–74.

Badan Pusat Statistik. 2024. "Panduan Aplikasi BOS." Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Laporan Kinerja Sekretaris Utama*. Badan Pusat Statistik.

Choirunnisa, Laili, Try Hajar, Caesar Oktaviana, Ahmad Ainur, and Elva Imeldatur

- Rohmah. 2023. "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Akseibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia." 3.
- Dwiyanti, Erina, and Made Aristia Prayudi. 2025. "Implementing Digital Technology in Public Financial Information Presentation." 10(2):202–11.
- Erbara, Acil, and Muhammad Takdir. 2022. "Systematic Literature Review: Implementasi Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan Di Indonesia." 2(1):1–10.
- Gantika, Soma. 2025. "Digitalisasi Administrasi Publik Dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat: Analisis Peran Moderasi Literasi Digital Di Kota Bandung." 7(1):403–13.
- Hardianti, Silvia, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, and Henny Andiyani Wirananda. 2025. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam." (September).
- Harianto, Deni, Kennedy, and Arumega Zarefar. 2021. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)." 6(1):122–39. doi: 10.29303/jaa.v6i1.111.
- Hasanah, Maulidatul, and Mohammad Djasuli. 2025. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang." 11:156–64.
- Hermanto, Fera Tri Wulandari, Andri Widiyanto, and Aryanto. 2021. "Analisis Determinasi Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal." 5:502–12.
- Laoli, Victorinus. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias." 3.
- Mergel, Ines, Noella Edelman, and Nathalie Haug. 2019. "Defining Digital Transformation : Results From Expert Interviews." *Government Information Quarterly* 36(4):101385. doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002.
- Noorrahman, Moh. Fajar, Muhammad Rizal, and Muhammad Sairin. 2022. "Peran Administrasi Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Dalam Aspek Kepuasan Kerja Pada Pejabat Struktural Akademik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai." 1(1):155–63.
- Permatasari, Iman Amanda. 2020. *Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Vol. 1. Yogyakarta, Indonesia: CV. The Journal Publishing.
- Puspasari, Gusti Ayu Dewi, and Agus Budi Santoso. 2018. "Peningkatan

Akuntabilitas Laporan Keuangan Melalui Implementasi Goessti: Analisis Strategis Di BAPPEDA Kota Semarang.”

- R, Siti Rahmah, Ivon Jalil, and Fitria Mandaraira. 2024. “Analisis Penerapan Aplikasi *Back Office Selindo* Pada Manajemen Anggaran Di BPS Kota Banda Aceh.” 2(2):76–85. doi: 10.59996/globalistik.v2i2.559.
- Rachman, Arif, E. Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, and Hery Purnomo. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. CV Saba Jaya Publisher.
- Renanda, Alfian Agus, and Angga Rosidin. 2025. “Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik.” 1(8):1651–57.
- Salsabella, Mutiara. 2024. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Bos (Backoffice Selindo) Dalam Menunjang Efektivitas Pembayaran Uang Lembur Di BPS Kabupaten Pekalongan.” 1(1):47–57.
- Saputra, Wawan Nova, Ipah Ema, Indah Nurmala Sari, and Qaulis Tsabit Ramadhan. 2024. “Transformasi Birokrasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan E-Government.” III(2):82–94.
- Sugiono, Bagus Eko. 2022. “Pengembangan Aplikasi Back Office Untuk Mendukung Proses Operasional Pt Gradana Teknoruci Indonesia.” Universitas Pembangunan Jaya.
- Supardi, Suyuti, Thamrin Abduh, and Muh Kafrawi Yunus. 2022. “Tanggung Jawab Dan Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupatrn Pinrang.” 5(1):75–81. doi: 10.35965/jbm.v5i1.1866.
- Sutmasa, Y. Gede. 2021. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” 04(01):25–36.
- Utami, Pri. 2023. “Artikel Transformasi Aadministrasi Publik : Inovasi Dan Adaptasi Menuju Eefisiensi Dan Pelayanan Publik.” 6(2):1–9.
- Wahyudiono, Andhika. 2024. “Transformasi Digital Manajemen Keuangan UMKM Melalui Workshop Aplikasi Labamu Dan Pencatatan Keuangan Efisien.” 02(01):156–68.